

## **BAB VI**

### **KESIMPULAN DAN SARAN**

#### **A. Kesimpulan**

Otonomi daerah yang diterapkan di Era Reformasi membawa dampak pada penyelenggaraan politik lokal di daerah. Salah satu dinamika politik lokal adalah keberadaan partai politik dalam pemerintahan di daerah. Hal ini dapat dilihat dari pemilihan umum yang dilakukan untuk memilih pemimpin daerah dan wakil daerah. Eksistensi partai politik di daerah akan terlihat dari jumlah kader yang berhasil di tempatkan partai di lembaga perwakilan atau pemerintah daerah. Golkar sebagai salah satu partai yang telah eksis semenjak pemerintahan Orde Baru serta partai yang menjadi pemimpin dan mendominasi di Sumatera Barat dengan menegakkan hegemoni partai yang terstruktur dari pusat sampai daerah, mengalami kemerosotan di Era Reformasi.

Menurunnya perolehan suara Partai Golkar dalam setiap pemilihan umum baik di pusat maupun di daerah salah satunya Sumatera Barat, menunjukkan bahwa Partai Golkar bukan lagi satu-satunya partai yang dominan dengan terus memimpin dan mempertahankan kepemimpinannya. Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan kemerosotan hegemoni Partai Golkar yang terjadi di Sumatera Barat, dapat dianalisis dari tiga elemen hegemoni menurut Gramsci yakni, State (Pemerintahan), Civil Society ( Organisasi Massa) dan Intelektual (Organik dan Tradisional).

Pertama, elemen dari negara (pemerintahan), secara struktural dari pusat sampai ke daerah kekuatan dari negara yang membesarkan Golkar hilang dengan digantinya

sistem yang menjadi lebih demokratis, dari penghapusan Dwi Fungsi ABRI dan pengembalian birokrasi sebagai aparat negara yang netral secara politik, sampai perubahan terhadap sistem lama.

Dari elemen *civil society*, terdapat Ormas-ormas yang menjadi afiliasi Partai Golkar sebelumnya menjadi independen. Independensi Ormas ini berdampak pada tidak optimalnya dukungan dari ormas seperti Kosgoro, MKGR, Soksi, AMPI, serta KNPI. Kemudian kemunculan partai politik baru yang berhasil mempengaruhi simpati massa, yakni kemunculan Demokrat dan Gerindra. Dan ketiga, komposisi dari pemilih tradisional yang merupakan orang-orang yang loyal pada Partai Golkar yang tergolong pada usia tua, sehingga kemampuan meregenerasikan *party id* sangat terbatas. Elemen yang terakhir adalah intelektual, yang terdiri dari intelektual tradisional dan intelektual organik (kader partai). Dari segi intelektual tradisional Golkar tidak lagi memonopoli tokoh-tokoh dalam masyarakat, seperti LKAAM atau MUI. Dari segi intelektual Organik, semakin menurunnya sumber daya kader dengan banyaknya kader instan

Selain dari ketiga elemen di atas, adanya dualisme kepemimpinan pusat Partai Golkar juga mempengaruhi manajemen dan posisi partai di daerah. Pertama, pengabaian terhadap paradigma baru partai yang telah dibentuk sejak perubahan Golkar menjadi Partai Golkar yang lebih demokratis secara organisasi. Hal ini ditandai dengan pelaksanaan Musda yang tidak demokratis dimana keputusan hanya diambil oleh sekelompok elit partai daerah, kemudian adanya pengabaian terhadap sistem pengkaderan yang disebut *meryt system*. Selanjutnya, dalam *Even Pilkada*

Serentak Sumbar Tahun 2015, Partai Golkar kehilangan banyak jabatan kepala daerah, secara organisasi partai, hal ini dipengaruhi oleh rumitnya mekanisme pengajuan calon diantara dua kubu dan efek negatif dari prahara pusat yang terus diberitakan di media massa yang menimbulkan citra negatif Partai Golkar.

## B. Saran

Sebagai sebuah organisasi politik yang telah memiliki sejarah panjang dan salah satu partai di Indonesia yang secara institusional demokratis, Partai Golkar memiliki formulasi tersendiri bagi organisasinya. Namun, berdasarkan temuan data dalam penelitian secara praktis setidaknya terdapat beberapa saran penelitian yang relevan terhadap Partai Golkar. *pertama*, baik di pusat atau di daerah Partai Golkar harus memiliki figur yang mampu mempengaruhi massa, dalam artian figur yang mampu mendulang suara untuk partai dan membawa citra yang baik bagi partai. *Kedua*, Menghadapi konflik pusat, daerah mesti tetap menjaga kesolidan Golkar Sumbar dengan menjaga Paradigma dan nilai-nilai partai, dengan menjadi partai yang lebih demokratis dalam setiap pengambilan keputusan di daerah.

Selanjutnya, secara akademis masih ada beberapa kekurangan dalam penelitian ini terkait fenomena yang belum dapat dijelaskan peneliti dalam penelitian ini, saran untuk penelitian selanjutnya yang dapat dilakukan adalah terkait konflik partai di pusat dan faksi-faksi yang terbentuk di Partai Golkar Sumbar. Dalam penelitian ini belum diteliti lebih lanjut terkait faksi yang ada dalam Partai Golkar di Sumbar. Kemudian, peneliti selanjutnya juga dapat mengeksplorasi mengenai adanya elit-elit Partai Golkar di Sumbar yang mempengaruhi pengambilan keputusan partai di

daerah. Mesti memiliki mekanisme pengambilan keputusan secara musyawarah baik dalam menentukan kebijakan partai daerah atau pemilihan ketua umum, namun mekanisme ini hanya bersifat formalitas saja. Keputusan sejatinya telah dibentuk oleh beberapa sekelompok elit partai di daerah, seperti dalam pemilihan ketua partai di Sumbar serta penentuan kader yang akan dicalonkan dalam pemilihan umum.

